

**KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEJAHATAN
TERORGANISIR TRANSNASIONAL SERTA KETAHANAN NEGARA DI
AMERIKA SELATAN**

Nur Adila¹ Adhi Munajar²

nuradilaa0404@gmail.com & adhi.munajar@uin-suska.ac.id

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Kebijakan War on Drugs muncul sebagai agenda global pada awal 1970-an, menempatkan narkoba sebagai ancaman utama terhadap keamanan negara dan stabilitas sosial, dengan dampak signifikan terhadap Amerika Selatan sebagai wilayah produsen dan transit utama kokain. Penelitian ini menganalisis implementasi War on Drugs dan pengaruhnya terhadap kejahatan terorganisir transnasional serta ketahanan negara. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka naratif dan kritis dengan sintesis tematik terhadap jurnal akademik, buku, dan laporan internasional, termasuk data UNODC, untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan konsekuensi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan represif meningkatkan fragmentasi jaringan kriminal, eskalasi kekerasan, dan diversifikasi aktivitas ilegal, sementara negara menghadapi keterbatasan kapasitas institusi, infiltrasi korupsi, dan erosi legitimasi publik. Kesimpulannya, meski bertujuan memperkuat keamanan, pendekatan dominan koersif dapat melemahkan ketahanan negara. Strategi multidimensional yang seimbang antara penegakan hukum, pembangunan sosial, dan kesehatan publik diperlukan untuk efektivitas jangka panjang.

Kata kunci : Narkoba, Kokain, Kejahatan Terorganisir Transnasional, Ketahanan Negara, Amerika Selatan

Abstract

The War on Drugs emerged as a global agenda in the early 1970s, framing narcotics as a major threat to national security and social stability, particularly impacting South America as a key cocaine-producing and transit region. This study analyzes the implementation of the War on Drugs and its effects on transnational organized crime and state resilience. Using a narrative and critical literature review, with thematic synthesis of academic journals, books, and international reports including UNODC data, the study identifies patterns, strategies, and policy consequences. Findings reveal that repressive measures exacerbate criminal network fragmentation, escalate violence, and diversify illegal activities, while states face institutional limitations, corruption, and eroding public legitimacy. The study concludes that although intended to enhance security, coercive approaches may undermine state resilience. A balanced, multidimensional strategy combining law enforcement, social development, and public health is essential for long-term effectiveness.

Keywords: Narcotics, Cocaine, Transnational Organized Crime, State Resilience, South America

PENDAHULUAN

Kebijakan *War on Drugs* muncul sebagai bagian dari agenda keamanan global sejak awal 1970-an, terutama setelah pemerintah Amerika Serikat secara resmi mendeklarasikan narkoba sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional. Sejak saat itu, narkoba tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan kesehatan atau sosial, melainkan direkonstruksi sebagai isu keamanan yang memerlukan respons represif melalui penegakan hukum dan militerisasi kebijakan (Nunn, 1971; Andreas & Nadelmann, 2006). Pendekatan ini kemudian diadopsi secara luas dalam rezim pengendalian narkoba internasional dan memengaruhi arah kebijakan di berbagai kawasan dunia.

Dalam konteks tersebut, Amerika Selatan menempati posisi strategis dalam sistem narkoba internasional, baik sebagai wilayah utama produksi bahan baku narkoba maupun sebagai jalur distribusi lintas negara. Negara-negara seperti Kolombia, Peru, dan Bolivia secara historis menjadi bagian penting dalam rantai pasok narkoba global, sehingga kawasan ini menjadi fokus utama implementasi kebijakan *War on Drugs* di tingkat regional dan internasional (UNODC, 2023). Tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, mendorong negara-negara di Amerika Selatan untuk mengadopsi kebijakan yang menekankan pemberantasan produksi dan distribusi narkoba melalui pendekatan keamanan.

Namun, literatur menunjukkan bahwa implementasi *War on Drugs* di Amerika Selatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan terorganisir transnasional. Jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tekanan negara, termasuk melalui fragmentasi organisasi, diversifikasi aktivitas kriminal, dan perluasan operasi lintas batas negara (Bagley, 2012). Kondisi ini menjadikan kejahatan terorganisir transnasional sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks dan berkelanjutan.

Keberlanjutan ancaman tersebut berimplikasi langsung terhadap ketahanan negara, khususnya dalam aspek kapasitas institusional, supremasi hukum, dan legitimasi negara di mata masyarakat. Beberapa kajian menekankan bahwa intensifikasi kebijakan represif dalam kerangka *War on Drugs* justru dapat melemahkan ketahanan negara dengan meningkatkan tingkat kekerasan, memperluas korupsi, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara (Tokatlian, 2010; Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan demikian, hubungan antara *War on Drugs*, kejahatan terorganisir transnasional, dan ketahanan negara membentuk suatu dinamika kebijakan yang bersifat paradoksal.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis literatur akademik mengenai kebijakan *War on Drugs* di Amerika Selatan serta dinamikanya dalam perspektif kejahatan terorganisir transnasional dan ketahanan negara. Melalui kajian literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dengan mensintesis temuan-temuan utama dalam studi sebelumnya serta mengidentifikasi celah penelitian yang relevan bagi pengembangan kajian keamanan dan politik kawasan Amerika Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian literatur (*literature review*) dengan tujuan untuk mensintesis dan menganalisis secara sistematis temuan-temuan akademik terkait kebijakan *War on Drugs* di Amerika Selatan serta dinamikanya dalam perspektif kejahatan terorganisir transnasional dan ketahanan negara. Kajian literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap perkembangan konsep, perdebatan teoretis, serta pola temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative literature review dengan kecenderungan critical literature review. Pendekatan naratif memungkinkan penyusunan pemahaman yang terstruktur mengenai tema dan argumen utama dalam literatur, sementara pendekatan kritis digunakan untuk menilai secara reflektif asumsi, keterbatasan, dan bias yang terdapat dalam kajian-kajian sebelumnya (Snyder, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga mengkaji hubungan konseptual dan celah penelitian yang masih terbuka.

Sumber data dalam kajian ini berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan isu narkoba, kejahatan terorganisir transnasional, dan keamanan negara. Jurnal ilmiah dipilih dari basis data akademik yang memuat kajian politik internasional, keamanan, dan kebijakan publik, sementara laporan lembaga internasional seperti UNODC digunakan untuk memperkaya konteks kebijakan dan dinamika kawasan. Penggunaan berbagai jenis sumber ini bertujuan untuk meningkatkan keluasan perspektif dan validitas kajian (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Teknik penelusuran literatur dilakukan melalui pencarian kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti *War on Drugs*, *transnational organized crime*, *state resilience*, dan *Latin America*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi,

antara lain relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kontribusi terhadap pembahasan kebijakan keamanan dan kejahatan terorganisir. Sementara itu, literatur yang bersifat duplikatif, tidak relevan secara konseptual, atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari kajian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik sintesis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan-temuan utama dalam literatur ke dalam tema-tema analitis yang berkaitan dengan kebijakan *War on Drugs*, dinamika kejahatan terorganisir transnasional, dan ketahanan negara. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar konsep, serta perbedaan pandangan dalam literatur secara sistematis (Braun & Clarke, 2006). Hasil sintesis tematik tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menjawab tujuan penelitian dan memperkuat argumen konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum War on Drugs sebagai Kebijakan Global

War on Drugs tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan domestik negara tertentu, melainkan sebagai rezim kebijakan global yang membentuk cara negara-negara memahami, mengklasifikasikan, dan merespons persoalan narkotika. Di Amerika Selatan, kebijakan ini beroperasi sebagai kerangka normatif sekaligus praktis yang memengaruhi desain hukum, prioritas keamanan, serta hubungan negara dengan aktor eksternal.

Kebijakan *War on Drugs* atau Perang terhadap Narkotika merupakan inisiatif global yang dipelopori oleh Amerika Serikat sejak awal 1970-an. Kebijakan ini mengedepankan pendekatan *prohibitionist* yang menekankan kriminalisasi produksi, distribusi, dan konsumsi narkotika, dengan harapan dapat menekan peredaran narkotika secara global. Pendekatan ini menekankan sisi penawaran (*supply reduction*), di mana negara-negara produsen narkotika ditekan untuk menghentikan produksi, sementara jalur distribusi dikontrol secara militer dan hukum. Dalam praktiknya, kebijakan ini membentuk kerangka global yang mengikat negara-negara produsen dan transit narkotika, khususnya di Amerika Selatan, dalam sistem pengendalian narkotika internasional.

Di sisi lain, kebijakan ini menunjukkan keterbatasan, karena produksi dan konsumsi narkotika terus meningkat meskipun ada berbagai operasi internasional dan program anti-narkotika berskala besar. Misalnya, Plan Colombia yang dijalankan sejak 1999 hingga 2005 dengan dukungan dana lebih dari 10 miliar USD, bertujuan mengurangi produksi kokain 50%, namun produksi global tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perang terhadap narkotika

membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan publik dalam setiap strategi.

a. Posisi Strategis Amerika Selatan dalam Sistem Narkotika Internasional

Amerika Selatan menempati posisi struktural yang krusial dalam sistem narkotika internasional, bukan sekadar sebagai wilayah produksi, tetapi juga sebagai simpul utama dalam rantai pasok global narkotika. Kawasan inikhususnya negara-negara Andes seperti Kolombia, Peru, dan Bolivia, secara historis merupakan produsen utama daun koka, bahan baku utama kokain. Menurut estimasi lembaga internasional, lebih dari 95% produksi kokain global berasal dari wilayah Andes, dengan Kolombia secara konsisten menempati posisi teratas dalam hal luas lahan koka dan volume produksi.

Namun, posisi Amerika Selatan tidak berhenti pada fungsi produksi. Seiring meningkatnya tekanan penegakan hukum di rute tradisional Karibia sejak dekade 1990-an, kawasan ini juga berkembang menjadi wilayah transit strategis, terutama melalui Brasil, Venezuela, dan negara-negara Amerika Tengah sebagai penghubung ke pasar Amerika Utara dan Eropa. Brasil, misalnya, bukan produsen utama koka, tetapi berperan sebagai koridor logistik penting menuju pasar Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan Atlantik.

Struktur ini menjadikan Amerika Selatan berada dalam posisi asimetris: kawasan ini menanggung beban sosial, politik, dan keamanan dari produksi dan distribusi narkotika, sementara permintaan utama berasal dari negara-negara Global North. Dalam literatur ekonomi politik narkotika, kondisi ini sering dipahami sebagai bentuk *externalization of costs*, di mana biaya sosial dari konsumsi global dialihkan ke negara-negara produsen dan transit.

b. Pengaruh Rezim Internasional Pengendalian Narkotika

Kebijakan *War on Drugs* di Amerika Selatan tidak terlepas dari pengaruh kuat rezim internasional pengendalian narkotika yang dibangun sejak pertengahan abad ke-20. Rezim ini berlandaskan pada tiga konvensi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa: Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psicotropika 1971, dan Konvensi 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika.

Konvensi-konvensi tersebut menetapkan paradigma bahwa narkotika adalah ancaman kriminal dan keamanan, bukan isu sosial atau kesehatan semata. Negara-negara Amerika Selatan, sebagai bagian dari komunitas internasional, mengadopsi kewajiban-kewajiban ini ke dalam hukum nasional mereka, termasuk kriminalisasi produksi, distribusi, dan kepemilikan narkotika tertentu.

Dampaknya terlihat jelas dalam homogenisasi kebijakan nasional di kawasan. Bolivia, misalnya, meskipun memiliki tradisi kultural penggunaan daun koka, tetap berada di bawah tekanan internasional untuk membatasi dan mengkriminalisasi praktik tersebut. Literatur menunjukkan bahwa rezim internasional ini tidak netral secara kultural, karena cenderung mengabaikan praktik lokal dan sejarah penggunaan tradisional, serta memaksakan definisi narkoba yang bersifat universal.

Selain rezim multilateral, *War on Drugs* di Amerika Selatan sangat dipengaruhi oleh peran aktor eksternal, terutama Amerika Serikat. Sejak dekade 1970-an, Amerika Serikat secara aktif memosisikan narkoba sebagai ancaman keamanan nasional, dan kebijakan ini diekspor ke kawasan melalui mekanisme bantuan keamanan, diplomasi, dan tekanan politik.

Contoh paling konkret adalah Plan Colombia, yang diluncurkan pada akhir 1990-an. Program ini menggabungkan bantuan militer, pelatihan aparat keamanan, serta operasi eradikasi tanaman koka dalam skala besar. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, Amerika Serikat mengalokasikan miliaran dolar untuk mendukung kebijakan antinarkoba Kolombia, dengan fokus utama pada pendekatan koersif.

Pendekatan serupa juga diterapkan melalui kebijakan sertifikasi (*drug certification*), di mana Amerika Serikat menilai komitmen negara-negara Amerika Selatan dalam memerangi narkoba. Negara yang dianggap tidak kooperatif berisiko menghadapi sanksi ekonomi atau pengurangan bantuan. Mekanisme ini secara efektif menciptakan hubungan hierarkis, di mana preferensi kebijakan Amerika Serikat memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan keputusan nasional negara-negara kawasan.

c. Dominasi Pendekatan Keamanan dibandingkan Kesehatan Publik

Salah satu ciri paling menonjol dari *War on Drugs* sebagai kebijakan global adalah dominasi pendekatan keamanan (*security-oriented approach*) dibandingkan pendekatan kesehatan publik. Di Amerika Selatan, hal ini tercermin dalam alokasi anggaran negara yang lebih besar untuk militerisasi dan penegakan hukum dibandingkan pencegahan, rehabilitasi, atau pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa di banyak negara Amerika Selatan, lebih dari 70% anggaran kebijakan narkoba diarahkan pada operasi keamanan, termasuk patroli militer, operasi udara, dan pembangunan kapasitas aparat penegak hukum. Sebaliknya, layanan kesehatan bagi pengguna narkoba—seperti terapi ketergantungan atau layanan rehabilitasi berbasis komunitas—sering kali berada di pinggiran kebijakan publik. Misalnya, Kolombia

melakukan penyemprotan aerial terhadap tanaman coca, sementara Meksiko menjalankan operasi militer berskala besar untuk menumpas kartel narkoba (Bagley, 2013).

Pendekatan ini menghasilkan beberapa konsekuensi negatif, termasuk overcrowded prisons, pelanggaran HAM, dan meningkatnya kekerasan bersenjata. UNODC (2008) mencatat bahwa lima konsekuensi negatif utama dari sistem ini adalah: pasar gelap besar, perpindahan lokasi produksi (*balloon effect*), perpindahan jenis narkoba, kriminalisasi massal, dan diskriminasi sosial terhadap pengguna

Dominasi pendekatan keamanan ini berimplikasi langsung pada peningkatan kriminalisasi kelompok rentan, termasuk petani koka skala kecil dan pengguna narkoba non-kekerasan. Literatur kesehatan masyarakat mengindikasikan bahwa kriminalisasi yang berlebihan justru memperburuk akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan stigma sosial, tanpa secara signifikan menurunkan tingkat konsumsi narkoba.

d. Penyesuaian Kebijakan Global dalam Konteks Nasional Amerika Selatan

Meskipun *War on Drugs* memiliki kerangka global yang relatif seragam, implementasinya di Amerika Selatan tidak bersifat homogen. Setiap negara melakukan penyesuaian berdasarkan konteks politik, sosial, dan institusional domestik. Kolombia, misalnya, mengadopsi pendekatan militeristik yang intensif seiring dengan konflik bersenjata internal dan keberadaan kelompok gerilya. Di sisi lain, Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales berupaya mereinterpretasi kebijakan narkoba dengan mengakui penggunaan tradisional daun koka, meskipun tetap berada dalam tekanan rezim internasional.

Brasil menghadapi tantangan berbeda, di mana kebijakan *War on Drugs* beririsan dengan persoalan kejahatan perkotaan dan kontrol wilayah oleh kelompok kriminal bersenjata di kawasan favelas. Di sini, kebijakan global disesuaikan dengan konteks urban security, menghasilkan pola militerisasi polisi dan operasi keamanan skala besar di wilayah padat penduduk.

Literatur mengindikasikan bahwa penyesuaian ini sering kali bersifat pragmatis dan reaktif, bukan transformasional. Negara-negara Amerika Selatan berupaya menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap norma global dan tekanan domestik, namun ruang kebijakan mereka tetap dibatasi oleh struktur global *War on Drugs* itu sendiri.

War on Drugs merupakan kebijakan global yang menempatkan narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan ketertiban sosial, sehingga penanganannya difokuskan pada pendekatan penegakan hukum dan keamanan. Kebijakan ini dicirikan oleh kriminalisasi

produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba, serta penggunaan instrumen koersif negara sebagai sarana utama pengendalian (Andreas & Nadelmann, 2006). Dalam perspektif keamanan, War on Drugs mencerminkan proses pengamanan isu narkoba, di mana negara membenarkan penerapan langkah-langkah luar biasa demi menjaga stabilitas dan kedaulatan (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

2. Dinamika Kebijakan War on Drugs di Amerika Selatan

a. Pola Umum Implementasi Kebijakan *War on Drugs*

Implementasi kebijakan *War on Drugs* di Amerika Selatan menunjukkan pola yang berbeda-beda tergantung pada posisi negara dalam rantai narkoba internasional. Negara produsen utama seperti Kolombia menekankan pada penegakan hukum dan eradikasi tanaman coca, termasuk pembongkaran laboratorium kokain. Menurut *UNODC World Drug Report 2025*, produksi global kokain mencapai 3.708 ton pada 2023, dengan Kolombia menyumbang lebih dari 67% dari total produksi coca dunia. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum yang intensif, produksi coca dan kokain tetap meningkat, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan represif semata.

Negara transit seperti Brasil, Ekuador, dan Peru memiliki fokus kebijakan yang berbeda, lebih menitikberatkan pada pengawasan jalur distribusi dan operasi lintas negara. Strategi ini melibatkan koordinasi intelijen dan operasi perbatasan untuk meminimalisir arus narkoba masuk maupun keluar wilayah mereka. Dengan demikian, meskipun ada kerangka kebijakan global yang seragam, pola implementasi domestik disesuaikan dengan peran masing-masing negara dalam rantai perdagangan narkoba, mencerminkan adaptasi terhadap kondisi lokal serta tekanan internasional.

Selain itu, negara-negara Amerika Selatan menyesuaikan kebijakan domestik mereka dengan rezim internasional pengendalian narkoba, misalnya dalam hal pelaporan statistik produksi, konsumsi, dan penegakan hukum. Koordinasi ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak hanya respons terhadap situasi internal, tetapi juga terintegrasi dalam kerangka global, menegaskan dimensi transnasional dari perang terhadap narkoba (UNODC, 2025).

b. Tingkat Militarisasi dalam Kebijakan Anti-Narkoba

Tingkat militarisasi di negara-negara Amerika Selatan menjadi ciri khas dari implementasi *War on Drugs*. Di Kolombia dan Meksiko, ribuan personel militer dikerahkan untuk operasi domestik anti-narkoba, menggantikan sebagian fungsi polisi sipil. Penelitian

Perret (2024) menyebutkan bahwa narasi keamanan digunakan untuk memperluas peran militer dalam operasi anti-narkotika, yang berdampak pada privatisasi keamanan, peningkatan operasi intelijen, dan jumlah penahanan.

Keterlibatan militer ini menimbulkan kritik akademik karena potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kontradiksi hukum internasional. Misalnya, dalam konteks non-perang, operasi militer domestik menimbulkan risiko pelanggaran hukum humaniter, yang menjadi perdebatan dalam literatur keamanan internasional (International Review of the Red Cross, 2024). Meski begitu, negara-negara produsen dan transit tetap mempertahankan keterlibatan militer untuk menghadapi ancaman kartel dan perdagangan narkotika skala besar, menegaskan dominasi pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan kesehatan publik.

Data empiris mendukung bahwa operasi militer skala besar terkait narkotika meningkat seiring waktu. Contohnya, Kolombia pada puncak operasi anti-narkotika menempatkan ribuan personel militer di daerah-daerah produksi coca, dan Meksiko mengalokasikan sumber daya signifikan untuk menghadapi kartel narkotika yang menguasai jalur distribusi utama.

c. Pergeseran Strategi Kebijakan dari Waktu ke Waktu

Seiring berjalannya waktu, beberapa negara mulai menyesuaikan kebijakan dari fokus pada eradikasi paksa menuju pendekatan yang lebih holistik. Di Kolombia, pemerintah baru mempromosikan program substitusi tanaman coca dan pendekatan kesehatan masyarakat yang menekankan pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan di daerah-daerah produksi.

Selain itu, muncul tren penerapan strategi *harm reduction*, rehabilitasi pengguna narkotika, dan edukasi kesehatan publik. Pendekatan ini diadopsi untuk mengurangi dampak sosial negatif dari kebijakan represif. Studi menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara mulai menerapkan kebijakan ini, adopsi secara menyeluruh masih terbatas, dan hasilnya bervariasi antarnegara.

Reformasi ini juga dipicu kritik dari *Global Commission on Drug Policy*, yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan kesehatan publik untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tradisional. Pergeseran strategi ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap evaluasi efektivitas jangka panjang, meskipun pengimplementasiannya tergantung konteks politik dan kapasitas institusi masing-masing negara.

d. Perbedaan Pendekatan Antar Negara Berdasarkan Posisi dalam Rantai Narkotika Internasional

Kolombia, sebagai produsen utama, tetap menekankan pada pengurangan produksi coca dan kontrol laboratorium kokain, karena negara ini menyumbang mayoritas produksi

global. Sementara negara transit seperti Brasil, Peru, dan Ekuador fokus pada kontrol jalur distribusi, koordinasi lintas negara, dan pengawasan perbatasan. Pendekatan ini mencerminkan prioritas nasional untuk mencegah aliran narkoba, bukan produksi domestik.

Meksiko, sebagai contoh negara transit besar, menghadapi eskalasi kekerasan kartel dan tekanan untuk mengalokasikan sumber daya besar bagi operasi penegakan hukum. Studi akademik menunjukkan bahwa intensitas operasi militer dan polisi di Meksiko berkorelasi langsung dengan peningkatan konflik dan kekerasan terkait perdagangan narkoba. Dengan demikian, posisi negara dalam rantai narkoba internasional menjadi penentu utama strategi dan prioritas kebijakan.

e. Hubungan antara Tekanan Internasional dan Dinamika Kebijakan Domestik

Negara-negara Amerika Selatan sering menerima tekanan dari Amerika Serikat, UNODC, dan lembaga internasional lain untuk memenuhi target kebijakan tertentu, misalnya eradikasi coca atau kontrol distribusi narkoba. Kolombia, misalnya, pernah mengalami decertification oleh AS karena dianggap tidak memenuhi standar perang narkoba, yang berdampak pada bantuan keamanan dan hubungan diplomatik.

Bantuan militer dan kerjasama intelijen sering dikaitkan dengan persyaratan tertentu, memengaruhi orientasi kebijakan domestik agar tetap selaras dengan ekspektasi global. Di sisi lain, pemerintah dengan orientasi politik baru mencoba resistensi terhadap tekanan eksternal, mengalihkan fokus dari penindakan represif ke strategi pengurangan dampak sosial. Hubungan ini menunjukkan bahwa tekanan internasional dan dinamika domestik saling mempengaruhi dalam menentukan arah kebijakan narkoba di Amerika Selatan.

3. Kejahatan Terorganisir Transnasional dalam Konteks War on Drugs

Kejahatan terorganisir transnasional di Amerika Selatan menunjukkan struktur jaringan yang kompleks dan sangat adaptif. Kartel narkoba Kolombia, misalnya, beroperasi melalui sub-organisasi yang mengelola produksi coca, pengolahan kokain, hingga distribusi ke pasar internasional, termasuk Amerika Utara dan Eropa. Jaringan ini bersifat desentralisasi sehingga ketika satu unit dihancurkan oleh operasi penegakan hukum, unit lain tetap dapat beroperasi dan menjaga kontinuitas suplai. Di negara-negara transit seperti Brasil dan Peru, kelompok kriminal memanfaatkan jalur transportasi regional seperti Amazon dan sungai Orinoco untuk menghubungkan produsen dengan pasar global, sekaligus melibatkan jaringan lokal dan lintas negara, termasuk kelompok mafia di Karibia dan Meksiko. Studi empiris menunjukkan bahwa

jaringan ini memanfaatkan teknologi komunikasi modern dan korupsi pejabat untuk menjaga kelancaran operasional, sehingga sifat transnasional dan adaptifnya sangat menonjol.

Kelompok kriminal di kawasan ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tekanan dari kebijakan negara. Di Kolombia, kartel merespon program eradikasi coca dengan menggeser lokasi ladang ke daerah terpencil, membangun laboratorium tersembunyi, dan memanfaatkan pejabat lokal yang korup. Distribusi narkoba juga diubah melalui jalur alternatif ketika jalur tradisional diserang, termasuk melalui laut Karibia, jalur sungai Amazon, dan wilayah perbatasan Bolivia–Peru. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga diterapkan, dengan kelompok kriminal memasuki perdagangan manusia, senjata, dan komoditas ilegal lain, sehingga kemampuan mereka bertahan menghadapi operasi penegakan hukum meningkat. Fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara kebijakan War on Drugs dan transformasi ekonomi serta struktural jaringan kriminal transnasional.

Upaya penegakan hukum yang intensif seringkali menghasilkan fragmentasi organisasi kriminal. Penangkapan pimpinan utama kartel di Meksiko dan Kolombia, misalnya, memicu munculnya kelompok-kelompok kecil yang lebih sulit diawasi. Fragmentasi ini mempengaruhi struktur internal organisasi, membuat hierarki yang sebelumnya terpusat menjadi lebih desentralisasi, meningkatkan mobilitas anggota, dan mempersulit operasi intelijen. Data empiris UNODC menunjukkan bahwa lebih dari 50 kelompok kriminal baru muncul di Kolombia antara 2021–2023 setelah operasi militer besar di wilayah produksi coca, menggambarkan dampak paradoksal dari operasi represif: meski satu kartel hancur, kekosongan kekuasaan memungkinkan munculnya kelompok baru dan eskalasi konflik.

Kebijakan War on Drugs juga berkaitan erat dengan eskalasi kekerasan di kawasan produsen dan transit narkoba. Data UNODC mencatat peningkatan kasus pembunuhan terkait kartel di Kolombia sekitar 15% antara 2020–2023 seiring intensifikasi operasi militer. Fragmentasi kartel menimbulkan persaingan wilayah dan jalur distribusi yang semakin sengit, sehingga kekerasan menjadi lebih sporadis namun kompleks, dengan penggunaan senjata berat, sabotase, dan serangan terhadap infrastruktur publik. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan represif tidak hanya berdampak pada produksi narkoba, tetapi juga pada stabilitas keamanan regional, menciptakan tantangan tambahan bagi aparat keamanan dan masyarakat lokal.

Lebih jauh, perdagangan narkoba sering menjadi inti dari jaringan kejahatan transnasional yang lebih luas. Kartel Kolombia misalnya memanfaatkan jalur distribusi kokain untuk penyelundupan manusia dan senjata, memanfaatkan jaringan logistik yang sama untuk

memperoleh keuntungan ganda. Di Meksiko dan Brasil, perdagangan narkoba berinteraksi dengan kelompok kriminal lokal yang bergerak di bidang penyelundupan barang ilegal, pemerasan, dan korupsi pejabat publik, membentuk ekosistem kejahatan yang saling terkait. Interkoneksi ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba berdampak langsung pada struktur dan intensitas bentuk kejahatan transnasional lainnya, sehingga kebijakan penegakan hukum perlu mempertimbangkan efek sistemik, bukan hanya target produksi atau distribusi.

Dengan demikian, kejahatan terorganisir transnasional di Amerika Selatan menunjukkan karakter yang sangat adaptif, desentralisasi, dan multifungsi. Kebijakan *War on Drugs*, meskipun intensif dalam penegakan hukum dan militarisasi, sering kali memunculkan fragmentasi organisasi, eskalasi kekerasan, dan diversifikasi kriminal yang kompleks, menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik, mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum, kesehatan publik, dan stabilitas keamanan regional.

4. Implikasi terhadap Ketahanan Negara

Kebijakan *War on Drugs* di Amerika Selatan telah menimbulkan berbagai implikasi signifikan terhadap ketahanan negara, terutama terkait kapasitas institusi dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan internal. Negara-negara produsen dan transit narkoba, seperti Kolombia, Brasil, dan Peru, menghadapi tekanan besar untuk menindak produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba. Data UNODC 2025 menunjukkan bahwa meskipun operasi penegakan hukum meningkat, termasuk penyitaan kokain global lebih dari 2.275 ton, kapasitas negara untuk menahan laju produksi seringkali terbatas oleh faktor geografis dan logistik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan struktural: negara memiliki mandat penegakan hukum, tetapi kemampuan institusi untuk mengeksekusi secara efektif masih terbatas, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor kriminal transnasional.

Kerentanan lembaga negara terhadap korupsi dan infiltrasi aktor kriminal menjadi konsekuensi langsung dari implementasi kebijakan anti-narkoba yang agresif. Studi di Kolombia dan Meksiko mengungkapkan bahwa keterlibatan kartel dalam penetrasi pejabat lokal dan aparat penegak hukum memengaruhi efektivitas operasi, sekaligus melemahkan legitimasi institusi publik. Penelitian dari *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (2024) mencatat bahwa sekitar 20–30% kasus penangkapan dan operasi anti-narkoba mengalami kompromi akibat kolusi lokal, sehingga fragmentasi organisasi kriminal dan infiltrasi jaringan kriminal semakin memperlemah ketahanan institusional.

Dampak kebijakan *War on Drugs* terhadap supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan juga cukup signifikan. Penggunaan militer dalam operasi domestik, seperti yang terjadi di Kolombia dan Meksiko, memperluas yurisdiksi aparat keamanan di luar ranah sipil, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara prinsip hukum, hak asasi manusia, dan efisiensi penegakan hukum. Literatur dari *International Review of the Red Cross* (2024) menekankan bahwa kondisi ini meningkatkan risiko pelanggaran HAM, memperlemah mekanisme checks and balances, dan menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menjaga legitimasi hukum domestik serta kepatuhan pada standar internasional.

Selain itu, kebijakan represif ini berdampak pada stabilitas politik dan sosial. Intensifikasi operasi anti-narkoba sering menimbulkan konflik lokal, perpindahan penduduk akibat eradikasi tanaman coca, dan eskalasi kekerasan antar kelompok kriminal. Data statistik pembunuhan terkait narkoba di Kolombia antara 2020–2023 meningkat sekitar 15%, menunjukkan korelasi antara intensifikasi kebijakan dan tekanan sosial di wilayah terdampak. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan politik, mempersulit konsolidasi pemerintahan, dan memunculkan resistensi publik terhadap kebijakan negara.

Perubahan tingkat kepercayaan publik terhadap negara juga menjadi indikator penting dari ketahanan nasional. Survei opini di Kolombia, Brasil, dan Peru menunjukkan bahwa masyarakat di daerah rawan narkoba cenderung skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan keamanan dan perlindungan hukum. Ketidakpercayaan ini diperkuat oleh korupsi, kekerasan, dan ketidakefektifan penegakan hukum, sehingga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi legitimasi politik dan kohesi sosial. Secara keseluruhan, *War on Drugs* memunculkan paradoks: upaya penegakan hukum yang agresif dan militarisasi, meski meningkatkan kontrol formal, seringkali justru memperlemah ketahanan negara melalui fragmentasi institusi, korupsi, dan erosi kepercayaan publik.

Secara akademik, temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang seimbang antara keamanan, supremasi hukum, dan pembangunan sosial. Integrasi strategi pengurangan permintaan narkoba, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan transparansi institusi dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan negara terhadap tantangan kompleks kejahatan transnasional yang ditimbulkan oleh *War on Drugs*.

5. Interaksi dan Paradoks Kebijakan

Penerapan *War on Drugs* di Amerika Selatan memperlihatkan interaksi yang kompleks antara kebijakan keamanan negara dan respons yang muncul dari kejahatan terorganisir. Intensifikasi operasi anti-narkotika melalui eradikasi tanaman coca, penegakan hukum berskala besar, dan pelibatan militer tidak selalu menghasilkan penurunan produksi narkotika atau penurunan kekerasan. Sebaliknya, literatur dan laporan UNODC 2025 menunjukkan bahwa peningkatan tekanan terhadap jaringan kriminal sering memicu adaptasi strategi oleh kartel, seperti penggunaan rute distribusi alternatif, diversifikasi produk ilegal, dan fragmentasi organisasi. Fenomena ini menciptakan *loop* timbal balik di mana kebijakan keamanan yang agresif memunculkan respons yang semakin kompleks dari aktor kriminal, sehingga hasil yang diharapkan seringkali tidak tercapai secara penuh.

Paradoks dari kebijakan ini terlihat jelas pada konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama eskalasi kekerasan dan fragmentasi kelompok kriminal. Misalnya, penelitian oleh *SAGE Journals* (2024) mencatat bahwa operasi penegakan hukum di Meksiko dan Kolombia meningkatkan konflik antarkartel dan memunculkan kelompok kriminal baru yang lebih kecil dan lebih sulit dikendalikan. Fragmentasi ini, yang disebut juga *splintering effect*, justru memperumit pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan risiko korban sipil. Dengan demikian, kebijakan yang awalnya bertujuan memperkuat keamanan dan menekan produksi narkotika secara paradoks menimbulkan ketidakstabilan lokal dan ancaman baru terhadap keamanan publik.

Selain itu, penerapan kebijakan yang menekankan pendekatan keamanan menimbulkan ketegangan antara tujuan negara untuk menjamin keamanan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Eksekusi operasi militer dan polisi dalam konteks domestik menimbulkan pengungsian masyarakat, gangguan ekonomi lokal, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Survei opini publik di daerah terdampak di Kolombia dan Brasil menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan, sekaligus meningkatnya persepsi ketidakadilan hukum. Dampak sosial ini menegaskan bahwa fokus semata pada aspek represif kebijakan dapat mengurangi efektivitas jangka panjang dalam membangun ketahanan negara yang berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas kebijakan dalam memperkuat ketahanan negara menunjukkan hasil yang ambivalen. Meskipun beberapa indikator formal, seperti jumlah penyitaan narkotika dan operasi penegakan hukum, meningkat, indikator kelembagaan dan sosial justru menunjukkan kelemahan: infiltrasi aparat, korupsi, fragmentasi institusi, serta meningkatnya

ketidakpercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa *War on Drugs* sebagai kebijakan nasional dan global tidak selalu selaras dengan tujuan ketahanan negara secara holistik. Studi oleh *International Review of the Red Cross* (2024) menyebutkan bahwa strategi yang menekankan penindakan semata cenderung mengabaikan dimensi kesehatan masyarakat, pembangunan sosial, dan pembangunan kapasitas institusi, yang justru penting untuk ketahanan jangka panjang.

Secara keseluruhan, *War on Drugs* di Amerika Selatan merupakan contoh nyata dari kebijakan yang menghasilkan paradoks: setiap peningkatan intensitas operasi keamanan untuk menekan kejahatan terorganisir tidak selalu sejalan dengan penguatan stabilitas sosial dan kelembagaan. Fenomena ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dan multidimensional, yang mengintegrasikan penegakan hukum, reformasi kelembagaan, pengurangan permintaan narkoba, serta pembangunan sosial lokal, sehingga tujuan keamanan dan ketahanan negara dapat dicapai secara lebih efektif tanpa menimbulkan konsekuensi sosial yang merugikan.

KESIMPULAN

Kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan di Amerika Selatan sejak dekade 1970-an telah membentuk kerangka keamanan global yang menempatkan narkoba sebagai ancaman utama terhadap stabilitas nasional dan sosial. Penerapan kebijakan ini, yang menekankan kriminalisasi produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba serta pendekatan koersif melalui aparat keamanan dan militer, secara signifikan memengaruhi dinamika kejahatan terorganisir transnasional di kawasan. Jaringan kriminal, khususnya kartel narkoba, menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi melalui fragmentasi organisasi, diversifikasi aktivitas ilegal, dan pergeseran rute distribusi, sehingga operasi penegakan hukum sering kali menghasilkan efek paradoksal, termasuk eskalasi kekerasan dan munculnya kelompok kriminal baru yang lebih sulit dikendalikan.

Dampak kebijakan *War on Drugs* terhadap ketahanan negara juga bersifat ambivalen. Sementara operasi represif meningkatkan kapasitas formal negara dalam penegakan hukum, tekanan yang berlebihan terhadap jaringan kriminal memperlihatkan keterbatasan institusional, kerentanan terhadap korupsi, erosi legitimasi, dan menurunnya kepercayaan publik. Fenomena ini menegaskan bahwa fokus semata pada pendekatan keamanan tanpa integrasi strategi sosial,

ekonomi, dan kesehatan publik dapat mengurangi efektivitas jangka panjang dalam memperkuat stabilitas negara dan masyarakat.

Secara konseptual, temuan kajian literatur ini menekankan bahwa *War on Drugs* merupakan kebijakan yang menghasilkan paradoks: meskipun bertujuan memperkuat keamanan dan mengurangi peredaran narkoba, kebijakan ini sering memunculkan efek sebaliknya berupa fragmentasi kejahatan, eskalasi kekerasan, dan kelemahan institusional. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan negara di Amerika Selatan memerlukan pendekatan multidimensional yang seimbang antara penegakan hukum, reformasi kelembagaan, pengurangan permintaan narkoba, serta pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Integrasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, menekan dampak negatif dari kejahatan terorganisir transnasional, dan memperkuat legitimasi serta kapasitas negara dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, P., & Nadelmann, E. (2006). *Policing the globe: Criminalization and crime control in international relations*. Oxford University Press.
- AP News. (2024). UN says Colombia's coca crop at all-time high as officials promote new drug policies. <https://apnews.com/article/033c449cf1124b4ce23cec3716e1aeef>
- Bagley, B. M. (2012). *Drug trafficking and organized crime in the Americas: Major trends in the twenty-first century*. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Bewley-Taylor, D. R. (2012). *International drug control: Consensus fractured*. Cambridge University Press.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review*. Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- CELS. (2024). *The internal war: How the fight against drugs is militarizing Latin America*. Centro de Estudios Legales y Sociales. <https://www.cels.org.ar/militarizacion/pdf/theinternalwar.pdf>
- Coletta A. Youngers and Eileen Rosin, eds., *Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005).
- Global Commission on Drug Policy. (2011). *War on drugs*. Geneva: GCDP.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2024). *Organized crime and drug trafficking in Latin America*. <https://globalinitiative.net>

- Gootenberg, P. (2008). *Andean cocaine: The making of a global drug*. University of North Carolina Press.
- International Review of the Red Cross. (2024). Militarization and privatization of security in Latin America. <https://international-review.icrc.org>
- Isacson, A. (2011). Militarization and the drug war in Latin America. *Journal of International Affairs*, 64(2), 1–18.
- Kleiman, M. A. R., Caulkins, J. P., & Hawken, A. (2011). *Drugs and drug policy: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Kompas. (2024, June 27). Menilik permasalahan narkoba dunia di Hari Anti Narkotika Internasional. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/06/27/084800782/menilik-permasalahan-narkoba-dunia-di-hari-anti-narkotika-internasional?page=all>
- Nunn, R. (1971). *Special message to the Congress on drug abuse prevention and control*. The White House.
- Perret, A. (2024). Militarization and privatization of security: From the war on drugs to Latin America. *International Review of the Red Cross*. <https://international-review.icrc.org/articles/militarization-and-privatization-of-security-923>
- Reuters. (2024, October 18). Colombian coca leaf farming hits two-decade high. <https://www.reuters.com/world/americas/colombian-coca-leaf-farming-hit-two-decade-high-2023-un-says-2024-10-18>
- SAGE Journals. (2024). Militarism and militarization in Latin America. *Journal of Latin American Studies*. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03043754241237648>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Statista. (2023). Coca leaf producing countries worldwide and cocaine users by region. <https://www.statista.com/chart/31551/coca-leaf-producing-countries-worldwide-and-cocaine-users-by-region>
- Tate, W. (2015). *Drugs, thugs, and diplomats: U.S. policymaking in Colombia*. Stanford University Press.
- Thoumi, F. (2003). *Illegal drugs, economy, and society in the Andes*. Woodrow Wilson Center Press.
- Tokatlian, J. G. (2010). A view from the south: The drugs problem and US–Latin American relations. *International Journal of Drug Policy*, 21(3), 196–201. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2009.07.005>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *World drug report 2023*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2023.html>

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). *World drug report 2025: Key findings*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B1_Key_findings.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). *World drug report 2025 – Statistical annex*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025-annex.html>
- United Nations. (1961). *Single convention on narcotic drugs*. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>
- Winifred, T. (2015). *Drugs, thugs, and diplomats: U.S. policymaking in Colombia*. Stanford University Press.